

Distribusi Bantuan Pangan BULOG Baubau Sasar 14.926 Penerima di 43 Kelurahan, Mulai Disalurkan Pada 95 Penerima di Kelurahan Wale Untuk Februari dan Maret



Penyaluran di Kelurahan Wale, Kota Baubau

Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP- Perum BULOG Cabang Baubau mulai menyalurkan Bantuan Pangan (Banpang) alokasi Februari dan Maret 2026 kepada masyarakat di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Penyaluran di Kelurahan Wale, tercatat sebanyak 95 Penerima Bantuan Pangan (PBP) menerima bantuan berupa beras sebanyak 20 kilogram dan

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Lakukan Penyegaran Birokrasi, 105 Pejabat Resmi Dilantik Berdasarkan Rekomendasi BKN, Berikut Nama-Namanya



Bupati Busel H Muh Adios melantik 104 pejabat sesuai rekomendasi BKN

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BAUBAPOST.COM - Muhammad Adios resmi melakukan perombakan kabinet dengan melantik dan memutasi puluhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) Sulawesi Tenggara (Sultra). Pelantikan tersebut dipusatkan

di gedung Lamaindo. Perombakan Kabinet tertuang dalam Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 119 Tahun 2026 tentang pengangkatan, pengukuhan, dan mutasi ASN dalam jabatan administrator dan pengawas. Keputusan itu ditetapkan di Batauga pada 26 Maret 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Dalam keputusan terse-

but, Bupati menimbang sejumlah rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara, di antaranya surat Nomor 603/RAK/02.03/SD-F.I/2026 tertanggal 16 Maret 2026 serta beberapa surat rekomendasi lainnya terkait pengangkatan dan mutasi pejabat administrator maupun pengawas di Kabupaten Buton Selatan.

Lanjut ke Hal: 7

Kampung Kadatua di Buton Selatan Diduga Jadi Mabas Judi Sabung Ayam, Bagaimana Jawaban Kapolsek Kadatua?



Arena sabung ayam di Kampung Kadatua

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP- Aktivitas perjudian sabung ayam diduga masih marak terjadi di wilayah Kecamatan Kadatua, tepatnya di Desa Banabungi, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra). Praktik ilegal tersebut bahkan disebut-sebut telah menjadikan Kampung Kadatua sebagai markas bersama (mabas) bagi para pelaku judi.

Meski hanya merupakan kampung kecil, Kadatua diduga menjadi lokasi strategis bagi aktivitas sabung ayam yang berlangsung secara terorganisir. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan tersebut kerap melibatkan pemain dari berbagai daerah, tidak hanya warga setempat, tetapi juga dari kabupaten lain di sekitar Buton Selatan.

Dalam setiap pelaksanaan sabung ayam, sejumlah ekor ayam disiapkan

untuk bertarung di arena. Para pemilik ayam kemudian saling berhadapan sambil melakukan tawar-menawar nilai taruhan.

Nominal taruhan pun bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga mencapai puluhan juta rupiah dalam satu pertandingan.

Tak hanya sabung ayam, praktik perjudian lain juga diduga ber-

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Azhari Tegaskan Kamomose sebagai Identitas Budaya Buton Tengah



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Bupati Buton Tengah, Azhari, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Kamomose yang digelar di pelataran Gedung Kesenian Lakudo, Rabu malam (25/3/2026). Tradisi tersebut dinilai memiliki nilai historis, edukatif, dan identitas kuat bagi masyarakat setempat.

Kegiatan budaya ini berlangsung selama tiga

malam berturut-turut di sejumlah titik di Kecamatan Lakudo. Antusiasme masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa tradisi Kamomose masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial warga Buton Tengah.

Dalam kesempatan itu, Azhari menyatakan bahwa Kamomose bukan sekadar ritual adat, tetapi merupakan bagian dari sistem pendidikan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini menjadi ruang pembela-

jaran nilai moral, etika, dan kesiapan sosial bagi generasi muda, khususnya perempuan.

"Kamomose bukan hanya tontonan, tetapi tuntunan yang mengajarkan nilai kehidupan kepada generasi muda," ujar Azhari.

Ia menjelaskan, secara historis, Kamomose merupakan bagian dari rangkaian adat masyarakat Buton yang berkaitan dengan proses pendewasaan

Lanjut ke Hal: 7

Distribusi Bantuan Pangan B ULOG Baubau Sasar 14.926 Penerima di 43 Kelurahan, Mulai Disalurkan Pada 95 Penerima di Kelurahan Wale Untuk Februari dan Maret

minyak goreng 4 liter. Bantuan ini merupakan akumulasi untuk dua bulan, yakni Februari dan Maret 2026. Secara keseluruhan, jumlah pagu penerima bantuan pangan di Kota Baubau mencapai 14.926 PBP untuk setiap alokasi penyaluran yang akan disalurkan di 43

Kelurahan di Kota Baubau. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan serta membantu meringankan beban masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang masih berfluktuasi. Pimpinan Perum BULOG Baubau, Rit-

no, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan ini dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran, sesuai dengan data penerima yang telah ditetapkan. "Kami memastikan bantuan ini dapat diterima langsung oleh masyarakat yang berhak, serta ber-

jalan dengan tertib dan lancar," ujar Ritno pada awak media, (27/3/2026). Penyaluran bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Baubau. (*)

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Lakukan Penyegaran Birokrasi, 105 Pejabat Resmi Dilantik Berdasarkan Rekomendasi BKN, Berikut Nama-Namanya

tan. "Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu mengangkat, mengukuhkan, dan memindahkan pegawai ASN dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan," demikian kutipan dalam keputusan tersebut.

Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 10 orang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II), sementara 93 lainnya terdiri dari pejabat administrator dan pengawas.

Dalam perombakan tersebut, sejumlah pejabat Eselon II mengalami pergeseran posisi strategis. Insanu dipercaya mengemban jabatan baru sebagai Asisten III Sekretariat Daerah Buton Selatan. Sementara posisi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) yang ditinggalkannya untuk sementara diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Muhammad Thahir dilantik sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans). Jabatan yang ditinggalkannya kemudian dipercayakan kepada La Ganefo sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selanjutnya, posisi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) yang sebelumnya dijabat La Ganefo kini diisi oleh La Ode Safiati. Sementara jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang se-

belumnya diemban La Ode Safiati dipercayakan kepada MZ Amril Tamim. Adapun posisi Asisten II yang ditinggalkan MZ Amril Tamim kini diisi oleh La Safilin.

Berikut 10 nama Pejabat Eselon II yang di Lantik Bupati Buton Selatan H Muh Adios:

1. Drs. Maizat Amril Tamin MSI, Jabatan Baru, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Buton Selatan.
2. La Ode Safi M.Si, Jabatan Baru, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Buton Selatan.
3. Drs La Ganefo MH, Jabatan Baru, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton Selatan.
4. Muhammad Thahir S.Pd MM, Jabatan Baru, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) yang ditinggalkannya untuk sementara diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
5. Saharudin Sungka S.Pd M.Pd, Jabatan Baru Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Selatan.
6. Drs Lamakiki M.Pd, Jabatan Baru Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Selatan.
7. Laode Herianto Ss,M.Pd, Jabatan Baru, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Buton Selatan.
8. Drs La Ode Muhammad Syahid, Jabatan Baru, Kepala Badan Riset dan Ino-

vasi Daerah Kabupaten Buton Selatan.

9. Insanu Jabatan Baru, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Buton Selatan.

10. Drs La Safilin M.Si. Jabatan Baru, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Buton Selatan.

Berikut 95 Nama pejabat administrator dan pengawas Yang Dilantik:

1. Yusyita Jumarisi S.Pi,M.Si Jabatan Baru Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Selatan Eselon III A.
2. Asliah ST Jabatan Baru Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Buton Selatan Eselon III A.
3. Ahmad S.Ip M.Si, Jabatan Baru, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekda Kabupaten Buton Selatan, Eselon 3A.
4. Melita Zahabu S.Sos M.Si, Jabatan Baru, Kepala Bagian Organisasi Sekda Kabupaten Buton Selatan.
5. Wa Ode Nini Suharni SP, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Keasipan dan Perpustakaan Kabupaten Buton Selatan, Eselon 3A.
6. La Ode Muhammad Mustari SP,M.Si, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Buton Selatan, Eselon 3A.
7. Julan Satria ST, MPSI, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan, Eselon 3A.

8. Suparman Samiun SPI, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan, Eselon 3A.

9. Rusmin S.Pd, Jabatan Baru. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Selatan, Eselon 3A.

10. Eko Prasetyo STP, M.Kes Sos. Jabatan baru sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Selatan Eselon 3A.

11. Rosnia G. S.Sos Jabatan Baru Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Selatan Eselon 3A.

12. La Ode Muhammad Hidayat ST Jabatan Baru Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

13. Sahril Amal Eshud, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Buton Selatan, Eselon 3A.

14. Amat Rizal S.Pi,M.Si Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan, Eselon 3A.

15. La Ode Ali S.Sos, Jabatan Baru, Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton Selatan, Eselon 3A.

Daftar Nama lengkapnya bisa pembaca kunjungi situs www.baubaupost.com (*)

Bupati Azhari Tegaskan Kamomose sebagai Identitas Budaya Buton Tengah

perempuan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Tahapan ini menjadi lanjutan dari tradisi kaumbu yang berfungsi sebagai pembina awal bagi gadis-gadis Komomose.

Dalam perspektif sejarah, tradisi semacam ini memiliki kemiripan dengan praktik inisiasi perempuan di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, sejumlah daerah seperti Bali dan Nusa Tenggara juga mengenal ritus peralihan sebagai bagian dari siklus kehidupan masyarakat adat. Secara global, tradisi serupa ditemukan dalam budaya Afrika dan Amerika Latin sebagai simbol transisi menuju kedewasaan.

Azhari menekankan pentingnya menjaga keaslian tradisi di tengah arus modernisasi. Ia menyebutkan bahwa budaya lokal merupakan fondasi identitas yang tidak dapat tergantikan oleh perkembangan zaman.

"Tradisi ini harus kita pertahankan sebagai ciri khas masyarakat Lakudo dan Buton Tengah," katanya.

Pemerintah daerah

ah, lanjut dia, tetap memberikan dukungan terhadap pelestarian budaya, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Dukungan tersebut dilakukan secara bertahap melalui penguatan kelembagaan budaya dan fasilitasi kegiatan masyarakat.

"Walaupun dengan keterbatasan, kami tetap berupaya agar tradisi ini terus hidup dan berkembang," ujarnya.

Ke depan, pemerintah merencanakan penyelenggaraan Kamomose dalam satu lokasi terpusat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pertunjukan sekaligus membuka peluang pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya.

Selain itu, Azhari mendorong pengembangan sanggar seni sebagai wadah pembinaan generasi muda. Ia menilai keberadaan sanggar seni sangat penting untuk menjaga kesinambungan tradisi, terutama dalam bidang tari dan musik tradisional.

"Kami ingin generasi muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku budaya," ucapnya.

Dukungan pemerintah juga akan diarahkan pada penyediaan

sarana dan prasarana kesenian, termasuk alat musik tradisional yang akan diberikan secara bertahap dan merata kepada kelompok seni di daerah tersebut.

Acara ini turut dihadiri anggota DPRD Buton Tengah, Wakapolres Buton Tengah, para kepala organisasi perangkat daerah, Camat Lakudo, tokoh masyarakat, serta pemerhati budaya. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan sinergi lintas sektor dalam menjaga kelestarian budaya daerah.

Sebagai catatan historis, pelestarian budaya lokal di Indonesia telah menjadi bagian dari kebijakan nasional sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Regulasi ini menegaskan bahwa budaya merupakan investasi strategis dalam pembangunan nasional sekaligus penguatan identitas bangsa di tingkat global.

Dengan demikian, pelaksanaan Kamomose di Lakudo tidak hanya memiliki makna lokal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberagaman budaya Indonesia di mata dunia. (*)

Kampung Kadatua di Buton Selatan Diduga Jadi Mabas Judi Sabung Ayam, Bagaimana Jawaban Kapolsek Kadatua?

langsung di lokasi yang sama. Permainan dadu yang dikenal dengan sebutan 'celengko' menjadi alternatif taruhan bagi para pengunjung. Kehadiran dua jenis perjudian ini semakin menguatkan dugaan bahwa kawasan tersebut telah menjadi pusat aktivitas judi yang cukup aktif.

Ironisnya, aktivitas ini disebut masih terus berjalan meskipun pihak kepolisian telah beberapa kali melakukan penindakan. Para pelaku diduga kembali beroperasi setelah razia dilakukan, sehingga menimbulkan kesan tidak adanya efek jera.

Kapolsek Kadatua, Ipda Tafsir, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya pernah menerima laporan terkait aktivitas sabung ayam di wilayah tersebut. Ia mengatakan, polisi telah turun langsung ke lokasi untuk membubarkan kegiatan tersebut.

"Pada tanggal 18 Maret 2026 kami menerima laporan sabung ayam, kemudian langsung kami tindak lanjuti dengan melakukan pembubarannya di lokasi. Saat ini sudah tidak ada lagi kegiatan sabung ayam," ujar Ipda Tafsir melalui pesan WhatsApp, Selasa (24/3/2026).

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Berdasarkan hasil pantauan wartawan Baubau Post pada 23 Maret 2026, aktivitas judi sabung ayam diduga masih berlangsung di Kampung Kadatua. Sejumlah orang terlihat datang dan berkumpul untuk mengikuti pertandingan, bahkan beberapa di antaranya berasal dari luar daerah.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pengawasan serta penindakan yang telah dilakukan aparat penegak hukum.

Masyarakat pun berharap adanya langkah tegas dan berkelanjutan dari pihak berwenang agar praktik perjudian tersebut benar-benar dapat dihentikan.

Selain meresahkan warga, keberadaan aktivitas judi juga dikhawatirkan dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk bersama-sama menekan dan memberantas praktik perjudian di wilayah tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, aktivitas sabung ayam di Kampung Kadatua masih menjadi perhatian publik, sembari menunggu langkah konkret dari pihak berwenang untuk menertibkan dan menindak para pelaku sesuai hukum yang berlaku. (*)

WFH Segera Diumumkan, Prabowo Panggil Airlangga dan Purbaya



Menkeu Purbaya

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Pemerintah memastikan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) telah diputuskan secara internal dan tinggal menunggu pengumuman resmi kepada publik. Langkah ini menjadi respons atas dinamika global, terutama konflik di Timur Tengah yang berpotensi menekan stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keputusan tersebut bukan akan diumumkan olehnya, melainkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Sudah diputuskan, nanti diumumkan. Bukan saya yang ngomong, nanti Pak Menteri Perekonomian,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Pengumuman resmi itu, menurut dia, masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan akhir dalam kebijakan strategis nasional.

Di tengah pros-

es finalisasi tersebut, Presiden Prabowo memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Purbaya ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Airlangga tiba lebih dulu sekitar pukul 13.00 WIB, disusul Purbaya beberapa saat kemudian. Keduanya tampak enggan mengungkapkan detail pembahasan dalam pertemuan tersebut.

“Belum tahu,” kata Airlangga singkat saat ditanya wartawan mengenai agenda rapat.

Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang dalam sejarahnya kerap berdampak pada lonjakan harga energi global, termasuk minyak mentah. Kondisi serupa pernah terjadi saat krisis minyak 1973 dan konflik Teluk 1990, yang memicu tekanan inflasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Secara nasional, Indonesia juga memiliki pengalaman menerapkan

kebijakan kerja fleksibel pada masa pandemi COVID-19 sejak 2020. Saat itu, pemerintah mendorong WFH untuk menjaga aktivitas ekonomi sekaligus menekan penyebaran virus.

Kebijakan tersebut terbukti mampu menjaga keberlangsungan sektor tertentu, meskipun juga menimbulkan tantangan produktivitas dan koordinasi kerja di beberapa bidang.

Dalam konteks saat ini, pemerintah mempertimbangkan WFH bukan karena alasan kesehatan, melainkan sebagai strategi mitigasi risiko ekonomi akibat ketidakpastian global.

Selain itu, kebijakan ini juga dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama setelah pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Keputusan menahan harga BBM tersebut berimplikasi pada meningkatnya beban subsidi energi, sehingga

diperlukan langkah efisiensi di sektor lain, termasuk pola kerja aparatur dan sektor tertentu.

Purbaya mengisyaratkan bahwa kebijakan WFH ini telah melalui pembahasan lintas kementerian dan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari ekonomi, fiskal, hingga operasional pemerintahan.

Meski demikian, detail teknis seperti sektor yang akan menerapkan WFH, durasi kebijakan, serta mekanisme pengawasan masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan para menteri ekonomi tersebut dipandang sebagai tahap akhir koordinasi sebelum kebijakan diumumkan secara luas.

Langkah ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam merespons situasi global, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan keberlanjutan aktivitas nasional. (*)

Prabowo Blusukan Serap Aspirasi Warga Senen, Fokus Penyediaan Hunian Layak



Ilustrasi. Prabowo blusukan di Senen, Jakarta Pusat

Laporan: Hamid

JAKARTA, BP-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat saat meninjau langsung permukiman warga di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah melihat secara langsung kondisi riil masyarakat di wilayah padat perkotaan, sekaligus merumuskan solusi berbasis kebutuhan lapangan.

Dalam kegiatan itu, Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Sekretaris Pribadi Rizky Irmansyah, yang turut menyertai dialog dengan warga setempat.

Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah konkret guna meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat yang selama ini berada di kawasan kurang layak huni.

“Kita akan segera membangun hunian yang layak untuk masyarakat di daerah tersebut dengan cepat,” ujar Prabowo dalam pernyataan resminya.

Ia menambahkan bahwa penyediaan hunian layak bukan sekadar program pembangunan fisik, melainkan bagian dari strategi besar meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Menurut Prabowo, kawasan bantaran rel di Jakarta yang ia kunjungi berada dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, namun masih menghadapi tantangan dalam

hal kualitas permukiman.

“Pada sore hari ini, saya menyusuri pemukiman di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat,” ungkapnya melalui akun media sosial resmi.

Kehadiran Presiden disambut antusias warga. Sejumlah masyarakat tampak mendekat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengabadikan momen melalui swafoto.

Dalam interaksi tersebut, Prabowo juga terlihat berbincang santai dengan warga guna menggalang berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga kondisi lingkungan.

“Saya datang untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan memastikan negara hadir,” kata Prabowo dalam dialog singkat dengan warga.

Fenomena permukiman di bantaran rel bukan hal baru di Indonesia. Sejak dekade 1970-an, urbanisasi yang pesat ke kota-kota besar seperti Jakarta mendorong munculnya kawasan hunian informal di lahan-lahan terbatas.

Data historis menunjukkan bahwa program penataan kawasan kumuh telah dilakukan sejak era Orde Baru melalui berbagai skema, termasuk program perumahan kota dan pembangunan rumah susun sederhana.

Pada periode berikutnya, pemerintah juga meluncurkan Program Sejuta Rumah sejak 2015 sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Secara global,

persoalan serupa juga dihadapi berbagai negara berkembang. Kota-kota seperti Mumbai di India dan Manila di Filipina mengalami tekanan urbanisasi yang memicu tumbuhnya permukiman padat di kawasan rentan.

Organisasi seperti United Nations melalui program UN-Habitat telah lama mendorong kebijakan pembangunan perumahan inklusif sebagai solusi berkelanjutan atas masalah tersebut.

Dalam konteks ini, langkah pemerintah Indonesia untuk mempercepat penyediaan hunian layak dinilai menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan yang juga selaras dengan target global.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja cepat agar masyarakat dapat merasakan perubahan nyata dalam waktu yang tidak terlalu lama.

“Kami bertekad menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Kunjungan ini menjadi sinyal bahwa pendekatan langsung ke lapangan tetap menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan, terutama untuk memastikan program yang dijalankan tepat sasaran.

Dengan langkah tersebut, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret bagi persoalan permukiman sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. (*)

Dari PSBM Makassar, Gubernur Sultra ASR Amankan Ekspansi Sawah Rakyat 10 Ribu Ha



Laporan: Mashuri

MAKASSAR, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memperoleh tambahan program cetak sawah rakyat seluas 10 ribu hektare dalam ajang Pertemuan Saudagar Bugis-Makassar (PSBM) XXVI yang berlangsung di Ballroom Hotel Claro Makassar, Kamis (26/3/2026). Tambahan tersebut menjadi bagian dari strategi nasional memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat swasembada berkelanjutan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan langsung kebijakan tersebut di hadapan peserta forum. Ia menegaskan bahwa perluasan lahan menjadi langkah konkret dalam menghadapi tantangan pangan global.

“Sulawesi Tenggara tambah cetak sawah lagi 10 ribu, demi mendorong swasembada selanjutnya,” ujar Amran. Dengan tambahan itu, total luas program cetak sawah rakyat di Sultra kini mencapai 24.050 hektare, meningkat dari sebelumnya 14.050 hektare. Pemerintah menilai peningkatan ini akan memperkuat kapasitas produksi beras daerah sekaligus mengurangi ketergantungan

pasokan dari luar wilayah.

Kebijakan ini tidak terlepas dari arah pembangunan nasional yang sejak era Joko Widodo menempatkan sektor pangan sebagai prioritas strategis. Program cetak sawah sendiri telah berjalan sejak 2015 dan menjadi bagian dari agenda besar kedaulatan pangan Indonesia.

Secara historis, upaya perluasan lahan pertanian juga pernah dilakukan Indonesia pada masa Orde Baru melalui program transmigrasi dan intensifikasi pertanian yang mendorong swasembada beras pada 1984” sebuah capaian yang diakui oleh Food and Agriculture Organization.

Di tingkat global, sejumlah negara seperti Vietnam dan Thailand juga mengandalkan ekspansi dan modernisasi pertanian untuk menjadi eksportir beras utama dunia. Indonesia kini berupaya kembali memperkuat posisi tersebut melalui pendekatan berbasis teknologi dan perluasan lahan produktif.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, yang hadir sebagai pembicara dalam forum itu, menegaskan bahwa tambahan program tersebut merupakan

kan hasil dari upaya membangun sinergi lintas sektor.

“Kehadiran kami di forum ini adalah bagian dari membangun jejaring dan memastikan Sultra mendapat dukungan maksimal dari pusat,” katanya.

Ia menambahkan, sektor pangan menjadi prioritas utama pemerintah daerah, sejalan dengan konsep pembangunan agromaritim yang mengintegrasikan potensi pertanian dan kelautan.

Dalam kesempatan yang sama, Andi Sumangeruka juga menyinggung pentingnya integritas dalam kepemimpinan sebagai fondasi pembangunan daerah.

“Jangan pernah bertanya apa yang kau dapatkan dari negara, tetapi apa yang kau berikan untuk negara,” ujarnya.

Menurut dia, prinsip tersebut lahir dari pengalaman hidupnya sejak kecil di Pulau Wawonii, di mana ia menyaksikan langsung solidaritas sosial masyarakat yang membantu tanpa pamrih.

Pengalaman tersebut kemudian membentuk orientasi kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Ia menilai pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga

soal keberpihakan terhadap rakyat.

Forum PSBM XXVI yang mengusung tema “Saudagar Tangguh, Ekonomi Tumbuh” menjadi ruang strategis mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Halal Bihalal Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

Dalam perspektif pembangunan regional, forum semacam ini dinilai penting untuk mempercepat arus investasi dan membuka peluang kerja sama antarwilayah, khususnya di kawasan timur Indonesia yang masih membutuhkan percepatan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap tambahan program cetak sawah tersebut tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru serta memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi lintas sektor, Sultra optimistis dapat menjadi salah satu lumbung pangan baru di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. (*)

Hugua Fokuskan APBD ke Sektor Produktif, Perikanan Jadi Andalan



Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong optimalisasi aset sektor kelautan dan perikanan sebagai strategi utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir.

Langkah tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Ir. Hugua, M.Ling, saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Jasa Dok Perbengkelan dan Balai Benih Udang Mata pada Kamis (26/3/2026).

Dalam kunjungan itu, Hugua menyoroti pentingnya pemanfaatan fasilitas yang telah ada agar lebih produktif dan berdaya guna, dibandingkan membangun infrastruktur baru tanpa perencanaan matang.

“Pemanfaatan aset harus maksimal. Semua fasilitas yang ada harus benar-benar produktif, memberi nilai tambah, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Hugua.

Balai Jasa Dok Perbengkelan, misalnya, menjadi salah satu penopang utama aktivitas perikanan tangkap melalui layanan perawatan dan perbaikan kapal nelayan dengan biaya terjangkau.

Pada tahun 2025, balai tersebut mampu menyumbang PAD sebesar Rp128 juta dan ditargetkan meningkat menjadi Rp250 juta pada 2026. Bahkan, dengan peningkatan kapasitas fasilitas dari dua menjadi lima rel, potensi penerimaan daerah diperkirakan dapat menembus Rp500 juta per tahun.

Sementara itu, Balai Benih Udang Mata juga dinilai memiliki

prospek ekonomi besar. Dalam satu siklus produksi, fasilitas ini mampu menghasilkan hingga 1 juta benur, dengan total produksi tahunan mencapai 4 juta benur.

Benur tersebut telah dimanfaatkan oleh kawasan tambak di Konawe Selatan dan Bombana, dengan estimasi produksi udang mencapai 400 ton.

Jika mengacu pada harga rata-rata Rp60.000 per kilogram, nilai ekonomi yang dihasilkan dari sektor ini diperkirakan mencapai Rp24 miliar bagi pelaku usaha.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra, Sri Resqina R. Laydi, menyebutkan bahwa keberadaan balai tersebut juga menjadi sumber PAD dengan target Rp125 juta pada tahun 2026.

“Balai benih ini menjadi salah satu tulang punggung produksi udang berkualitas di Sultra, sekaligus berkontribusi terhadap penerimaan daerah,” ujarnya.

Hugua menambahkan, penguatan sektor kelautan tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Setelah kunjungan ini, kami akan berkoordinasi dengan gubernur dan DPRD agar penguatan sektor ini mendapat dukungan penuh melalui kebijakan dan penganggaran,” katanya.

Secara historis, sektor kelautan dan perikanan telah lama menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terus meningkat dalam satu dekade terakhir.

Indonesia sendiri dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau, serta memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar, termasuk perikanan tangkap dan budidaya.

Di tingkat global, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat bahwa sektor perikanan dan akuakultur menyumbang lebih dari 178 juta ton produksi pangan laut setiap tahun, dengan tren pertumbuhan yang stabil.

Potensi tersebut menjadikan pengelolaan aset kelautan sebagai salah satu strategi penting bagi daerah-daerah pesisir seperti Sulawesi Tenggara untuk memperkuat daya saing ekonomi.

Hugua menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan ke depan harus lebih fokus pada sektor-sektor produktif yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dampak langsung terhadap masyarakat.

“APBD harus diarahkan untuk memperkuat fasilitas yang sudah terbukti memberikan dampak ekonomi. Ini langkah strategis agar pembangunan lebih efisien dan tepat sasaran,” tegasnya.

Dengan optimalisasi aset yang ada serta dukungan kebijakan yang terarah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara optimistis sektor kelautan dan perikanan akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Selain meningkatkan PAD, langkah ini juga diharapkan mampu memperluas lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup nelayan serta pelaku usaha di sektor pesisir. (*)

Sidak Mendadak di OPD, Bupati Buton Alvin Akawijaya Tegaskan Etos Kerja ASN



Bupati Buton Alvin Akawijaya Sidak ASN mendadak masuk perdana kerja pasca lebaran

Pewartu: La Harman

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pelayanan publik melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, S.H., pada hari pertama kerja usai libur panjang Ramadan dan Idulfitri, Rabu (25/3/2026).

Langkah tersebut dilakukan di Kompleks Perkantoran Pemkab Buton, Takawa, Pasarwajo, dengan menasar sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan kesiapan aparatur sipil negara (ASN) kembali menjalankan tugasnya.

Dalam sidak itu, Bupati Alvin tidak hanya memeriksa tingkat kehadiran pegawai, tetapi juga meninjau langsung kondisi lingkungan kerja serta kesiapan fasilitas pelayanan publik di setiap kantor OPD.

Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal, meskipun aparatur baru saja menjalani masa libur panjang. "Kami ingin

memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik tanpa ada penurunan kualitas," ujar Alvin dalam keterangannya di sela kegiatan sidak.

Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya kedisiplinan ASN sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Menurut dia, kehadiran pegawai di hari pertama kerja menjadi indikator awal dalam menilai komitmen dan tanggung jawab aparatur terhadap tugasnya.

"Saya melakukan sidak untuk memastikan tidak ada ASN yang menambah masa libur di luar ketentuan," tegasnya.

Bupati Alvin juga menginstruksikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk memperketat pengawasan absensi, baik melalui sistem digital maupun manual.

"Absensi harus diperhatikan secara serius, baik yang digital maupun manual, agar tidak terjadi pelanggaran disiplin," katanya.

Dalam interaksinya dengan sejumlah pegawai dan pimpinan OPD, Alvin turut menggal informasi terkait kesiapan kerja pasca libur, termasuk hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelayanan.

Ia menambahkan, OPD dengan kehadiran pegawai yang rendah akan menjadi perhatian khusus untuk dievaluasi secara menyeluruh.

Praktik sidak semacam ini, menurut sejumlah pengamat administrasi publik, merupakan bagian dari tradisi pengawasan yang telah lama diterapkan di berbagai daerah di Indonesia untuk meningkatkan disiplin aparatur negara.

Secara historis, pengawasan terhadap kehadiran ASN telah menjadi perhatian pemerintah sejak era reformasi birokrasi awal 2000-an, terutama setelah diterbitkannya berbagai regulasi tentang disiplin pegawai negeri.

Di tingkat nasional, penegakan disiplin ASN diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang

mengatur kewajiban serta sanksi bagi pelanggaran disiplin.

Sementara itu, secara internasional, praktik inspeksi mendadak atau spot check juga menjadi metode umum dalam manajemen sektor publik untuk memastikan kepatuhan aparatur terhadap standar kerja, seperti yang diterapkan di berbagai negara dengan sistem birokrasi modern.

Melalui sidak ini, Pemerintah Kabupaten Buton berharap dapat membangun budaya kerja yang lebih disiplin, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Langkah tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh ASN agar terus meningkatkan etos kerja serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan publik.

Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Buton diharapkan dapat berjalan seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional. (*)

Bupati Azhari Tekankan Profesionalitas ASN Lewat Uji Kompetensi JPT



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menggelar evaluasi kinerja dan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sebagai langkah strategis memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini berlangsung pada Minggu (15/3/2026) di Aula Pancana, Lantai V Kantor Bupati.

Pelaksanaan uji kompetensi tersebut melibatkan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan pemerintah daerah, dengan tujuan menilai kesesuaian kompetensi, kualifikasi, serta kinerja mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Bupati Buton Tengah, Azhari, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dalam memastikan aparatur sipil negara memiliki kapasitas yang memadai.

"Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap pejabat benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan jabatan," ujar Azhari.

Menurut dia, birokrasi memiliki peran vital dalam mewujudkan visi dan misi pamban-

gunan daerah yang telah dirancang pemerintah bersama masyarakat.

Ia menambahkan, aparatur yang profesional dan adaptif akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, terutama dalam menghadapi dinamika perubahan yang semakin cepat.

"Birokrasi harus mampu bergerak cepat, responsif, dan tetap akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Muh Adam Basan serta tim panitia uji kompetensi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertugas memastikan proses berjalan objektif dan transparan.

Pelaksanaan evaluasi kinerja dan uji kompetensi ini juga menjadi bagian dari penyelarasan organisasi, khususnya bagi pejabat yang telah lama menduduki jabatan tertentu.

Secara historis, kebijakan evaluasi kinerja aparatur sipil negara di Indonesia telah diperkuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menekankan sistem merit dalam pengangkatan dan promosi jabatan.

Di tingkat global, praktik serupa telah lama diterapkan di berbagai negara maju sebagai bagian dari reformasi bi-

rokrasi, seperti di Inggris dan Australia, yang menempatkan kompetensi dan kinerja sebagai dasar utama penilaian pejabat publik.

Azhari menilai, penerapan sistem merit tersebut penting untuk memastikan setiap pejabat ditempatkan sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki.

"Dengan sistem ini, kita ingin memastikan tidak ada lagi penempatan jabatan yang tidak berbasis kompetensi," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap dapat menciptakan birokrasi yang lebih profesional, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ke depan, evaluasi kinerja dan uji kompetensi akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung reformasi birokrasi di Indonesia.

Upaya tersebut sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia. (*)

Ketua TP PKK Buton Selatan Ny Sitti Norma Adios Gencarkan Aksi Cegah dan Lawan Stunting di Batuatas Melalui Kesadaran Gizi



Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Buton Selatan Ny Sitti Norma Adios memimpin langsung kegiatan Gerakan Pencegahan Stunting

Laporan: Andina L

BUTON SELATAN, BP-Ujara percepatan penurunan stunting kembali digencarkan di wilayah kepulauan. Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Buton Selatan Ny Sitti Norma Adios memimpin langsung kegiatan Gerakan Pencegahan Stunting di Kecamatan Batuatas, Jumat (27/3/2026), sebagai bagian dari penguatan pembangunan sumber daya manusia sejak dini.

Kegiatan ini menitikberatkan pada perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi gizi, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan peran keluarga dalam mencegah stunting. Program tersebut juga selaras dengan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.

Dalam pelaksanaannya, gerakan ini melibatkan kader PKK, tenaga kesehatan, serta masyarakat Batuatas. Sasaran utama kegiatan adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki anak usia di bawah

dua tahun atau periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

"Pencegahan stunting harus dimulai dari keluarga. Edukasi tentang gizi seimbang dan pola asuh menjadi kunci agar anak tumbuh sehat dan optimal," ujar Sitti Norma Adios dalam sambutannya.

Ia menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak, melainkan berdampak pada perkembangan otak dan kemampuan belajar. Kondisi ini, menurutnya, dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Secara historis, isu stunting telah menjadi perhatian global. Organisasi World Health Organization mencatat bahwa stunting merupakan salah satu indikator utama kekurangan gizi kronis pada anak. Secara global, jutaan anak di berbagai negara berkembang masih mengalami kondisi ini akibat keterbatasan akses pangan bergizi dan layanan kesehatan.

Di Indonesia, perhatian terhadap stunting mulai diperkuat sejak satu dekade terakhir. Pemerintah melalui berbagai kebijakan nasional, terma-

suk strategi percepatan penurunan stunting sejak 2018, terus menargetkan penurunan prevalensi secara signifikan di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan seperti di Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan. Berdasarkan Data E PPGM Buton Selatan, angka prevalensi stunting di Kecamatan Batuatas pada tahun 2025 sebesar 24,5%.

"Kami ingin memastikan bahwa anak-anak di Batuatas mendapatkan hak yang sama untuk tumbuh sehat, cerdas, dan kuat, meskipun berada di wilayah kepulauan," tambahnya.

Program yang dilaksanakan di Batuatas mencakup pemeriksaan kesehatan ibu hamil, pemberian suplemen gizi, imunisasi anak, serta pemantauan tumbuh kembang melalui Posyandu. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman tentang pentingnya sanitasi dan kebersihan lingkungan.

Gerakan ini juga mendorong perubahan perilaku hidup sehat, seperti kebiasaan mencuci tangan, penggunaan air bersih, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Hal tersebut dinilai menja-

di faktor penting dalam mencegah terjadinya kekurangan gizi kronis pada anak.

"Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat memberikan dampak besar terhadap kesehatan anak. Ini yang terus kami dorong kepada masyarakat," ujarnya.

Upaya ini diharapkan mampu menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Buton Selatan secara bertahap. Pemerintah daerah bersama PKK berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program hingga ke wilayah terpencil.

"Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dalam pertumbuhan hanya karena kurangnya pengetahuan atau akses layanan kesehatan," tegasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah, kader PKK, dan masyarakat, gerakan ini diyakini dapat memberikan dampak nyata dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Hal ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi emas Indonesia khususnya di Buton Selatan pada masa mendatang. (*)

Pemerintah Andalkan One Way dan Cek Kesehatan untuk Arus Balik



SEMARANG, BP-Pemerintah memperkuat pengamanan arus balik Lebaran 2026 melalui kombinasi rekayasa lalu lintas, layanan kesehatan, serta edukasi kepada masyarakat guna menekan risiko kecelakaan dan memastikan perjalanan berlangsung aman dan lancar.

Langkah ini ditempuh menyusul meningkatnya volume kendaraan setelah puncak arus mudik, yang secara historis selalu diikuti lonjakan kepadatan dan potensi kecelakaan di berbagai ruas jalan utama di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa kebijakan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah atau one way menjadi instrumen penting dalam mengurai kepadatan kendaraan.

"Penerapan jalur satu arah ini merupakan upaya untuk mengurai kepadatan arus balik sekaligus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," ujar Pratikno saat meninjau arus kendaraan di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/3/2026).

Menurut dia, keberhasilan pengelolaan arus balik tahun ini tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor, mulai dari kepolisian, kementerian, hingga operator jalan tol.

"Ini adalah bentuk inovasi bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.

Di sisi lain, aspek kes-

ehatan menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat faktor kelelahan pengemudi kerap menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas.

Menteri Kesehatan menyatakan bahwa layanan pemeriksaan kesehatan gratis telah disiapkan di berbagai titik strategis seperti rest area dan pos kesehatan terpadu.

"Kami ingin memastikan masyarakat kembali dari mudik dalam kondisi sehat dan selamat," ujar Menteri Kesehatan.

Ia menambahkan, pengemudi menjadi kelompok prioritas dalam layanan tersebut karena memiliki peran krusial dalam keselamatan perjalanan.

"Kami mengimbau pengendara untuk beristirahat setiap tiga jam karena kelelahan dan kantuk menjadi faktor utama kecelakaan," katanya. Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat memanfaatkan moda transportasi alternatif yang lebih aman, termasuk layanan pengangkutan sepeda motor menggunakan kereta api untuk mengurangi beban jalan raya.

Secara historis, kebijakan rekayasa lalu lintas seperti one way telah diterapkan sejak beberapa tahun terakhir dan terbukti mampu mengurangi kepadatan secara signifikan, terutama di jalur tol Trans Jawa yang menjadi tulang punggung mobilitas saat Lebaran.

Data nasional menunjukkan bahwa angka kecelakaan selama periode mudik dan

arus balik cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir seiring peningkatan koordinasi lintas instansi dan kualitas infrastruktur jalan.

Fenomena serupa juga terjadi di sejumlah negara lain dengan mobilitas musiman tinggi, seperti saat libur Thanksgiving di Amerika Serikat atau Golden Week di Jepang, di mana pemerintah setempat mengandalkan manajemen lalu lintas dan kampanye keselamatan untuk menekan angka kecelakaan.

Pemerintah Indonesia menilai pendekatan terpadu antara rekayasa lalu lintas, layanan kesehatan, dan edukasi publik merupakan strategi efektif dalam menghadapi lonjakan mobilitas tahunan.

Hingga pertengahan periode arus balik, pemerintah melaporkan bahwa angka kecelakaan mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun volume kendaraan meningkat.

Ke depan, pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan yang diterapkan guna meningkatkan kualitas layanan serta memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap momentum Lebaran.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan serta menjaga kondisi fisik selama perjalanan demi keselamatan bersama. (*)

PT FAREN GRAFIKA



KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruokan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetyo
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun, Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak: Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: Rahim
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com
Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Imigrasi Bali Tangkap Buronan Interpol Asal Inggris di Bandara Ngurah Rai Bali



Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali menangkap seorang pria Warga Negara (WN) Inggris berinisial SL (45) di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Sabtu (28/3/2026).

Laporan: Amran

DENPASAR, BP-Sistem pengawasan keimigrasian Indonesia kembali menunjukkan efektivitasnya setelah seorang warga negara Inggris berinisial SL (45), yang masuk dalam daftar buronan internasional Interpol, berhasil diamankan saat tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Sabtu (28/3).

Penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas Kantor Imigrasi Ngurah Rai ketika SL baru mendarat dari Singapura sekitar pukul 12.40 WITA. Saat menjalani pemeriksaan dokumen perjalanan, sistem keimigrasian secara otomatis mendeteksi statusnya sebagai subjek red notice Interpol.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, menilai keberhasilan ini sebagai bukti nyata bahwa sistem pengawasan keimigrasian di wilayah Bali berjalan efektif, terintegrasi, dan responsif terhadap ancaman kejahatan lintas negara.

"Kami memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Imigrasi Ngurah Rai. Ini menunjuk-

kan bahwa sistem pengawasan berjalan optimal dan mampu merespons ancaman global dengan cepat," ujar Felucia.

Secara terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan, menjelaskan bahwa SL diduga merupakan pimpinan organisasi kriminal internasional yang terlibat dalam berbagai kejahatan serius.

"Berdasarkan data dan koordinasi intelijen, yang bersangkutan diduga mengendalikan jaringan kriminal dalam pengelolaan perusahaan fiktif serta tindak pidana pencucian uang," kata Bugie.

Ia menambahkan, penangkapan tersebut menjadi peringatan tegas bagi jaringan kejahatan transnasional bahwa Indonesia, khususnya Bali, bukan tempat aman untuk bersembunyi.

"Kami tegaskan, Bali tidak akan pernah menjadi tempat persembunyian yang aman bagi buronan internasional," ujarnya.

Bugie menuturkan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari integrasi sistem keimigrasian nasional dengan jaringan penegakan

hukum global, termasuk Interpol, yang memungkinkan deteksi dini terhadap daftar pencarian orang (DPO).

Setelah diamankan, SL langsung diserahkan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai, untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara historis, kerja sama antara Indonesia dan Interpol dalam menangani kejahatan lintas negara telah berlangsung lama. Indonesia menjadi anggota Interpol sejak 1954, dan sejak itu aktif dalam pertukaran data serta penegakan hukum internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, aparat Indonesia juga kerap menangkap buronan internasional di pintu masuk negara. Salah satu kasus menonjol adalah penangkapan buronan kasus keuangan asal asing di Bali dan Jakarta yang masuk melalui jalur udara internasional.

Fenomena meningkatnya kejahatan transnasional, termasuk pencucian uang dan penggunaan perusahaan fiktif, menjadi perhatian

global. Interpol mencatat bahwa praktik ini sering digunakan oleh jaringan kriminal untuk menyamarkan aliran dana ilegal lintas negara.

Felucia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat koordinasi antarinstansi dan meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan keimigrasian.

"Kami akan terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat kerja sama internasional untuk mencegah masuknya pelaku kejahatan lintas negara," katanya.

Penangkapan SL sekaligus memperlihatkan bahwa sistem keamanan perbatasan Indonesia semakin adaptif terhadap tantangan global, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan nasional dari ancaman kriminal internasional.

Langkah tegas ini diharapkan mampu mempersempit ruang gerak sindikat kejahatan global yang mencoba memanfaatkan mobilitas internasional sebagai celah untuk menghindari hukum. (*)

Bebas di Kasus KPK, Samin Tan Kini Ditahan Kejagung, Aktivitas Tambang Samin Tan Diduga Terus Berlanjut Sejak 2017



Kejagung tangkap bos tambang ilegal Samin Tan

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha tambang Samin Tan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pertambangan ilegal di Kalimantan Tengah yang berlangsung sejak 2017. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi kuat bahwa aktivitas pertambangan tetap berjalan meskipun izin usaha telah dicabut pemerintah sejak delapan tahun lalu.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarif Sulaiman Nahdi, menyatakan kegiatan ilegal itu dilakukan melalui PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).

"Setelah izin dicabut pada 2017, PT AKT masih terus melakukan penambangan dan penjualan hasil tambang secara tidak sah hingga tahun 2025," ujar Syarif dalam konferensi pers, Sabtu (28/3).

Dalam konstruksi perkara, Samin Tan disebut sebagai beneficial owner yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan tersebut, termasuk seluruh aktivitas yang dinilai melanggar hukum.

Lebih jauh, penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk oknum penyelenggara negara yang memiliki fungsi pengawasan di sektor pertambangan.

"Diduga ada kerja sama dengan pihak yang seharusnya melakukan pengawasan, sehingga kegiatan ini bisa berlangsung lama dan merugikan negara," kata Syarif.

Kejagung menegaskan bahwa praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara maupun perekonomian nasional. Namun, nilai pasti kerugian masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan tambang ilegal di Indonesia. Secara historis, pemerintah telah berupaya menertibkan sektor pertambangan melalui berbagai regulasi, termasuk pencabutan ribuan izin usaha pertambangan sejak era reformasi hingga penataan besar-besaran pada awal 2020-an.

Di tingkat global, praktik pertambangan ilegal juga menjadi sorotan, terutama karena dampaknya terhadap lingkungan dan hilangnya potensi penerimaan negara. Organisasi internasional seperti World Bank dan United Nations Environment Programme kerap menekankan pentingnya tata kelola sumber daya alam yang transparan.

Di Indonesia sendiri, kasus serupa pernah mencuat di sejumlah daerah seperti Kalimantan dan Sumatra, di mana lemahnya pengawasan sering menja-

di celah bagi praktik ilegal untuk terus berlangsung.

Samin Tan sebelumnya juga pernah terseret kasus hukum yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan suap kepada mantan anggota DPR, Eni Maulani Saragih.

Kasus tersebut berkaitan dengan pengurusan terminasi kontrak PK-P2B PT AKT. Meski sempat ditetapkan sebagai tersangka pada 2019, Samin Tan kemudian divonis bebas oleh Mahkamah Agung pada 2022.

Majelis hakim dalam putusan itu menilai bahwa Samin Tan merupakan korban pemerasan, sehingga tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Kini, Kejagung kembali menjerat Samin Tan dalam perkara berbeda. Ia disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 603 dan 604 terkait tindak pidana di bidang sumber daya alam.

"Proses hukum akan terus berjalan, termasuk menunggu hasil audit untuk memastikan kerugian negara," ujar Syarif.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan sektor pertambangan masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap izin dan regulasi yang berlaku. (*)

Pemkot Baubau Apresiasi Kasambu-sambu, Warisan Budaya Tetap Lestari



Pelaksanaan tradisi Kasambu-sambu yang digelar masyarakat Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-Lea,

Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau mengapresiasi pelaksanaan tradisi Kasambu-sambu yang digelar masyarakat Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-Lea, sebagai upaya menjaga warisan budaya leluhur di tengah arus modernisasi yang kian kuat.

Kegiatan adat yang sarat nilai spiritual dan sosial tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darus Salam, yang mewakili Wali Kota Baubau. Kehadiran pemerintah menjadi simbol dukungan terhadap pelestarian budaya lokal yang tetap hidup di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Sekda menegaskan pentingnya peran generasi muda sebagai penjaga keberlangsungan budaya. Ia mengingatkan bahwa identitas suatu daerah tidak hanya terletak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kekuatan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

“Jangan biarkan identitas kita luntur. Kenali tradisimu, banggalah dengan bahasamu,

dan lestarikan adatmu,” ujar La Ode Darus Salam di hadapan warga.

Tradisi Kasambu-sambu sendiri merupakan ritual makan bersama yang mengandung makna filosofis mendalam. Dalam praktiknya, seluruh masyarakat duduk bersama tanpa memandang status sosial, mencerminkan nilai kesetaraan dalam adat Pobinci-binci Kuli.

Menurut Sekda, nilai-nilai seperti Pooma-maasiaka (saling menyanggah), Pangkat ngkataka (saling menghormati), dan Pomae-maeka (saling menjaga martabat) menjadi fondasi utama dalam kehidupan sosial masyarakat Buton.

“Kasambu-sambu bukan sekadar makan bersama, tetapi simbol penguatan karakter dan persatuan masyarakat,” katanya.

Dari sisi pembangunan daerah, pemerintah melihat tradisi ini memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata budaya. Kelurahan Kolese dinilai dapat menjadi salah satu destinasi unggulan jika dikelola secara profesional tanpa menghilangkan nilai sakralnya.

“Jika dikemas dengan baik, tradisi ini bisa menarik wisatawan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Secara historis, tradisi makan bersama sebagai simbol persatuan bukan hanya ditemukan di Buton. Di berbagai daerah di Indonesia, seperti tradisi ‘megibung’ di Bali atau ‘kenduri’ di Sumatra, praktik serupa telah lama menjadi bagian dari budaya kolektif masyarakat Nusantara.

Bahkan secara internasional, konsep communal dining atau makan bersama juga dikenal luas dalam berbagai peradaban, seperti dalam budaya Timur Tengah dan Afrika, yang menjadikan aktivitas tersebut sebagai simbol persaudaraan dan solidaritas sosial.

Di Indonesia sendiri, pengakuan terhadap pentingnya budaya lokal semakin menguat sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mendorong pelestarian tradisi sebagai bagian

dari pembangunan nasional.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Baubau menilai pelestarian Kasambu-sambu tidak hanya penting secara kultural, tetapi juga strategis dalam memperkuat identitas daerah di tingkat nasional maupun global.

Pelaksanaan tradisi ini juga menjadi ruang edukasi bagi generasi muda untuk memahami akar budaya mereka. Keterlibatan pemuda dalam setiap prosesi dinilai sebagai langkah konkret dalam menjaga kesinambungan tradisi.

Acara yang berlangsung khidmat tersebut ditutup dengan doa bersama, sebagai bentuk harapan akan keberkahan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat Baubau ke depan.

Dengan tetap terjaga tradisi Kasambu-sambu, masyarakat Kolese menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu berarti meninggalkan budaya, melainkan dapat berjalan beriringan dengan pelestarian nilai-nilai luhur. (*)

Malona Kadiri Jadi Simbol Spiritualitas Masyarakat Buton di Akhir Ramadan



Laporan: Amat Jr

BAUBAU. BP-Menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, masyarakat eks-Kesultanan Buton bersama Pemerintah Kota Baubau kembali menggelar ritual adat Malona Kadiri di Masjid Agung Keraton Wolio pada Senin (16/3/2026) malam hingga Selasa (17/3/2026) dini hari. Tradisi ini menjadi penanda penting spiritualitas sekaligus warisan budaya yang terus dijaga lintas generasi.

Ritual yang berlangsung pada malam ke-27 Ramadan tersebut diyakini memiliki keterkaitan dengan momentum turunnya Lailatul Qadar, malam yang dalam tradisi Islam disebut lebih baik dari seribu bulan. Karena itu, pelaksanaan Malona Kadiri tidak hanya dimaknai sebagai adat, tetapi juga bagian dari refleksi keagamaan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darus Salam, menegaskan bahwa tradisi ini merupakan warisan leluhur yang memiliki nilai luhur dan harus dijaga keberlanjutannya.

“Ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi bagian dari identitas budaya dan spiritual masyarakat Buton yang harus terus dilestarikan,” ujarnya usai mengikuti prosesi.

Suasana khidmat tampak menyelimuti Masjid Agung

Keraton Wolio selama prosesi berlangsung. Warga mengikuti rangkaian kegiatan dengan tertib, mencerminkan kekuatan nilai religius yang menyatu dengan adat istiadat setempat.

Menurut La Ode Darus Salam, pelaksanaan ritual ini juga menjadi pengingat bahwa Ramadan segera berakhir. Ia mengajak masyarakat untuk memaksimalkan ibadah di penghujung bulan suci.

“Prosesi malam ini menandakan bahwa Ramadan akan segera berakhir. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan,” katanya.

Secara historis, tradisi Malona Kadiri tidak terlepas dari perjalanan panjang Kesultanan Buton yang sejak abad ke-16 telah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem adat dan pemerintahan. Kesultanan Buton dikenal sebagai salah satu kerajaan di Nusantara yang memiliki konstitusi tertulis, yakni Martabat Tujuh, yang mengatur kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.

Dalam konteks nasional, tradisi seperti Malona Kadiri mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang sejalan dengan semangat pelestarian budaya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Indonesia sendiri memiliki ribuan tradisi lokal yang menjadi identitas bangsa di tengah arus glo-

balisasi.

Sementara itu, dalam perspektif global, praktik serupa juga dapat ditemukan di berbagai negara Muslim yang menggabungkan tradisi lokal dengan ibadah Ramadan, seperti di Turki dan Maroko, di mana ritual malam akhir Ramadan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.

La Ode Darus Salam menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan tradisi tersebut.

“Budaya seperti ini harus terus kita laksanakan bersama agar tidak hilang ditelan zaman,” ujarnya.

Pelaksanaan Malona Kadiri juga menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal tetap relevan di tengah modernisasi. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga memperkuat kohesi sosial masyarakat.

Dengan antusiasme warga yang tinggi, Pemerintah Kota Baubau berharap Malona Kadiri dapat terus menjadi bagian dari warisan budaya yang memperkaya khazanah budaya nasional sekaligus memperkuat nilai religius masyarakat.

Di penghujung acara, masyarakat meninggalkan masjid dengan harapan memperoleh keberkahan Lailatul Qadar, sekaligus membara semangat baru menyambut hari kemenangan. (*)